



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan ke depan tidak terlepas dari kondisi riil yang ada pada saat ini. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011 – 2016 merupakan pembangunan yang berkelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan juga tidak terlepas dari kondisi riil capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai pada saat ini dengan kinerja yang direncanakan yang bermuara pada tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman atau tantangan yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah akan dipecahkan, maka terlebih dahulu diidentifikasi tiap-tiap permasalahan dan faktor-faktor penentu keberhasilan di masa yang akan datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan dan tantangan pembangunan yang mendesak yang akan dihadapi yaitu, tentang pelayanan dasar terhadap masyarakat yang dinilai masih jauh dari harapan atau belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2006 – 2011. Permasalahan ini akan menentukan agenda sasaran serta program pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam 5 (lima) tahun ke depan (2011 – 2016). Permasalahan tersebut, sebagaimana yang telah



diidentifikasi dan berdasarkan analisa lingkungan daerah yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain berkaitan dengan :

1. Belum optimalnya pelayanan publik
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan (*Good Governace*).
3. Penerapan *Information Communication and Technology* (ICT) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal.
4. Infrastruktur di tingkat desa/Kelurahan dan Kecamatan belum sepenuhnya memadai
5. Masih rendah kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah.
6. Angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi.
7. Masih terbatasnya prasarana dan sarana dasar;
8. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan;
9. Terbatasnya sumber daya dan akses pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
10. Belum berkembangnya BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam pengembangan ekonomi daerah;
11. Masih rendahnya minat dunia usaha dalam mengelola potensi sumberdaya alam;
12. Masih rendahnya produksi dan produktivitas potensi sumberdaya alam
13. Masih terbatas infrastruktur dalam Kota
14. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah
15. Tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik yang belum merata.
16. Belum memadainya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil
17. Belum tumbuh-kembangnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat Kota.
18. Belum optimalnya pengelolaan masalah persampahan dan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban ternak
19. Terbatasnya anggaran belanja daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan



20. Keterbatasan sumber energi listrik untuk menunjang pengembangan kebutuhan industri dan rumah tangga

Permasalahan-permasalahan tersebut, dianggap memiliki skala prioritas untuk ditangani pada lima tahun mendatang, yang kemudian akan dijabarkan dalam penanganan dan penyelesaian masalah melalui program dan kegiatan pembangunan daerah.

4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.



4.2.1 Isu Strategis Global Dan Nasional

Pada era otonomi daerah di milenium III ini, kecenderungan-kecenderungan besar yang diperkirakan akan mewarnai kehidupan sosial ekonomi di masa depan adalah :

a. Perubahan Persepsi Masyarakat Agraris Menuju Masyarakat Informasi dan Telekomunikasi.

Perubahan persepsi dalam masyarakat telah berlangsung sejak lama, akan tetapi intensitas dan kecepatannya semakin melaju dan masif di tahun-tahun mendatang sejalan dengan perkembangan pesat di bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) dan media informasi (TV, Internet). Bukan tidak mungkin kecenderungan tersebut akan melahirkan benturan-benturan dalam masyarakat, khususnya nilai-nilai budaya tradisional (pada masyarakat agraris).

Sebagaimana diketahui, budaya masyarakat modern menuntut hadirnya nilai-nilai baru seperti efisiensi, produktivitas dan rasionalitas dari masyarakat yang belum tentu dapat segera terpenuhi. Oleh karena itu dalam ikhtiar perumusan Visi-Misi Kabupaten Banggai Kepulauan yang diarahkan pada tatanan masyarakat yang sejahtera dan religius, maka perlu dipikirkan secara cermat dan tepat tentang adanya suatu strategi dalam rangka menangani kemungkinan lahirnya benturan-benturan nilai yang kemungkinan wujud di masa depan.

b. Arus Globalisasi Yang Semakin Masif dan Ekstensif

Dalam lingkup global, terdapat paling tidak dua hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian. *Pertama*, kemampuan kita dalam mengambil manfaat dari globalisasi. Kemampuan ini sangat bergantung pada **brain ware** (Mutu Modal Manusia/Kualitas Sumberdaya Manusia) yang dimiliki oleh setiap daerah. Manakala brain ware ini lemah, bukan tidak mungkin banyak peluang akan lewat begitu saja tanpa termanfaatkan; *kedua*, agar kita tidak hanyut dalam arus globalisasi itu, maka dituntut adanya *fleksibilitas budaya*. Suatu budaya dikatakan fleksibel, apabila pada satu sisi tetap memungkinkan masuknya elemen-elemen budaya lain yang positif dan pada sisi lain ia tetap kuat dalam mencegah masuknya elemen-elemen destruktif dan kontra produktif.



c. Perubahan Paradigma Sentralistik Menuju Desentralistik Dengan Otonomi Yang Luas.

Kecenderungan ini merupakan arus balik dari sistem *excessive centralization* yang telah berlangsung sejak lama yang dalam realitasnya telah menimbulkan perasaan perlakuan tidak adil oleh pemerintah pusat terhadap daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Sentralisasi dalam kenyataannya melahirkan ketimpangan struktural dan sektoral yang harus diakui tidak berhasil di atasi sampai terjadinya krisis multidimensi mulai paruh kedua Tahun 1997 yang lalu. Kecenderungan dari kehidupan yang sangat sentralistik ke kehidupan desentralistik dengan otonomi yang luas, diperkuat dan mendapat legalitas dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 (yang kemudian di revisi melalui UU No. 32 dan 33 tahun 2004). Masalah yang kemungkinan wujud dari kecenderungan ini adalah, bagaimana melaksanakan suatu pembangunan daerah yang tetap terintegrasi, tersinergi, efisien dan menjamin terciptanya alokasi sumberdaya daerah secara optional dalam rangka pemerataan dan keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Krisis Energi dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim yang beberapa tahun terakhir di Indonesia dipandang sebagai isu aneh, sekarang telah diperhitungkan oleh kalangan masyarakat setelah kenaikan laju inflasi 2010 melebihi target yang diperkirakan oleh pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia. Laju inflasi menjadi lebih tinggi karena kenaikan harga pangan di tingkat nasional (dan internasional) dan harga Minyak Bumi yang tidak stabil. Ketika Eropa membeku melebihi batas normal dan demikian pula dengan keadaan negara-negara di kawasan subtropis, maka harga BBM pun meningkat untuk melawan hawa dingin yang menusuk tulang. Krisis politik di hampir seluruh wilayah timur tengah sebagai pemasok utama minyak bumi mengakibatkan produksi minyak dunia berkurang drastis dan memicu kelangkaan BBM di dunia.

Kekurangan BBM fosil yang melahirkan gagasan pembatasan BBM bersubsidi dibandingkan menanggung secara bersama kenaikan harga BBM dunia dan kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik adalah respon pemerintah untuk



mentransmisikan tekanan fiskal kepada ekonomi rumah tangga dan ekonomi perusahaan, justru di tengah isu kelangkaan pangan.

Pada sisi lain dunia kini berada dalam ancaman krisis pangan. Ini juga menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia pada tahun 2011 ini. Di sejumlah negara, krisis pangan yang terjadi pada 2008 terbukti menyulut kerusuhan sosial yang serius. Bagi Indonesia, dampak yang ditimbulkan oleh krisis pangan bahkan bisa lebih serius jika pada saat yang sama suhu politik nasional terus memanas seperti yang mulai terasa akhir-akhir ini. Tanpa krisis pangan secara nasional pun, kelaparan sudah memakan ratusan atau bahkan ribuan korban di Indonesia. Di pedalaman dan daerah terpencil tanpa diketahui pemerintah daerah sebenarnya banyak warga yang mati akibat kekurangan makan.

e. Pemanasan Global (Global Warming)

Secara singkat pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pertanyaannya adalah: mengapa suhu permukaan bumi bisa meningkat. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktifitas manusia.

Khusus untuk mengawasi sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan International Panel on Climate Change (IPCC). Setiap beberapa tahun sekali, ribuan ahli dan peneliti-peneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global, dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuan- penemuan baru yang berhasil dikumpulkan, kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut . Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah kaca bertanggung jawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami, dan manusialah kontributor terbesar dari terciptanya gas-gas rumah kaca tersebut. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, peternakan, serta pembangkit tenaga listrik.



f. Milenium Development Goals (MDGs)

Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang musti dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari 'Deklarasi Millennium', dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatanganan pada September 2000.

Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015.

Untuk mencapai tujuan MDGs tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademika, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmennya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs. *MDGs* menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, dengan memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. Komitmen bersama terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia, dirumuskan dalam delapan Tujuan Pembangunan Milenium, yakni:

- a) Penghapusan kemiskinan (*Eradicate extreme poverty and hunger*),
- b) Pendidikan untuk semua (*Achieve universal primary education*),
- c) Persamaan gender (*Promote gender equality and empower women*),
- d) Perlawanan terhadap penyakit (*Combat HI V/AIDS, malaria, and other diseases*),
- e) Penurunan angka kematian anak (*Reduce child mortality*),
- f) Peningkatan kesehatan ibu (*Improve Maternal Health*),
- g) Pelestarian lingkungan hidup (*Ensure Environmental Sustainability*),
- h) Kerja sama global (*Develop a global partnership for development*).



4.2.2 Isu Strategis Wilayah Sulawesi

a. *Isu Strategis Umum*

Pengembangan wilayah Sulawesi, didalam dokumen perencanaan nasional diletakkan sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi ditempatkan sebagai wilayah pusat pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia dan sub-regional ASEAN. Dengan kondisi ini, wilayah Sulawesi memiliki akses perdagangan yang cukup strategis di dalam pembangunan Nasional.

Pembangunan Wilayah Sulawesi sebagaimana tertuang didalam RPJM Nasional 2010-2014, diarahkan untuk menjadi salah satu *lumbung pangan nasional* dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional.

Sesuai dengan RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki **daya saing tinggi** melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawaskawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional



lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai asset sosialbudaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal;(9) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; dan (10) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewartakan dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pusat-Pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado-Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder.

Kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi secara nasional juga diarahkan pada optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari.



b. Isu Strategis Khusus

1. Interkonektivitas Domestik Intrawilayah.

Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian KBI dan KTI.

2. Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tingkat Kemiskinan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi Utara yang jauh lebih baik. Tingkat kemiskinan relatif tinggi ditemui di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

3. Optimalisasi Pengembangan Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing Tinggi di Wilayah Sulawesi.

Dominasi sektor-sektor primer dalam perekonomian wilayah Sulawesi menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Padahal keragaman komoditas unggulan antardaerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan di seluruh Kabupaten/Kota.

4. Kapasitas Energi Listrik.

Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi termasuk di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai wilayah pembangunan propinsi Sulawesi tengah.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Selanjutnya, meningkatnya investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pelayanan publik yang efisien juga



mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

6. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Mitigasi Bencana.

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi.

c. Isu Lainnya

Pelaksanaan pembangunan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah. Kemajuan pembangunan antar wilayah ada yang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya.

Masyarakat di wilayah Indonesia Timur Sulawesi pada khususnya dan Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan (wilayah KTI), terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman dan daerah tertinggal, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan tanah, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan dan pencurian ikan, kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan. Masalah lain yang dihadapi adalah belum memadainya jaringan prasarana penunjang keterkaitan ekonomi wilayah, terbatasnya investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. Permasalahan tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim sebagai basis ekonomi



wilayah dan dasar keunggulan daya saing nasional.

Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut memerlukan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara pemerintah Sulawesi Tengah dan Indonesia timur dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah setempat termasuk pemerintah propinsi Sulawesi Tengah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pemecahan berbagai masalah di daerah juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



4.2.3 Isu-Isu Strategis Propinsi Sulawesi Tengah

Beberapa isu strategis yang dimiliki Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kualitas SDM di Sulawesi Tengah masih jauh tertinggal dibanding di sebagian besar provinsi se-Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 sebesar 70,70 poin yang masih dibawah rata-rata Nasional (lebih besar dari 80 poin), menempati urutan ke 3 setelah Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Bila dilihat dari skala Nasional, IPM SDM Sulawesi Tengah berada pada peringkat 22 dari seluruh Indonesia. Untuk daerah kabupaten dan kota, tahun 2009 pada umumnya termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas.

Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebagai penyumbang IPM terendah kedua yaitu sebesar 67,33 setelah Kabupaten Sigi sebagai penyumbang IPM terendah pertama, yaitu sebesar 67,11 pada tahun 2009. Sedangkan penyumbang IPM tertinggi adalah kota Palu dengan angka IPM sebesar 76,07 kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai sebesar 70,82 dan berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Morowali (70,41), Kabupaten Poso (69,63), Kabupaten Buol (69,48), Kabupaten Donggala (69,37), Kabupaten Parigi Moutong (68,53) dan Kabupaten Tojo Una-una (68,45). Indikator pencapaian peningkatan tertinggi dicapai pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan.

Dari indikator (indeks) tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pada aspek pendidikan dan ekonomi di kabupaten/kota maupun Sulawesi Tengah, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat serta perbaikan bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sulawesi Tengah, dengan tujuan agar kualitas SDM Sulawesi Tengah bisa sejajar dan bahkan melebihi daerah lainnya.

Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi, dan berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2010 sebaran kemiskinan



menurut kabupaten/kota, menurut jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 83.400 jiwa atau sebesar 18,32 persen sedangkan jumlah penduduk miskin yang terendah berada di Kabupaten Buol sebanyak 24.800 jiwa atau sebesar 5,45 persen dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Data terakhir dari jumlah penduduk miskin pada kondisi Maret 2011 berjumlah 423,630 jiwa (15,83 persen) dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tengah sebesar 2,633,430 Jiwa, pada tahun yang sama.

2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Belum Optimal.

Ekonomi kerakyatan dipercaya sebagai pilar perekonomian baik Regional maupun Nasional, perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota secara berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menunjukkan diatas rata-rata nasional, namun masih bertumpu pada sektor primer. Tingginya pertumbuhan pada sektor pertanian, relatif belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga kedepan diharapkan secara bertahap akan beralih kesektor industri sekunder, perdagangan dan jasa.

Nilai tambah produktivitas perekonomian masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi terutama teknologi tepat guna dan keterampilan. Disamping itu kurangnya permodalan, dan akses pasar, juga sebagai penyebab rendahnya nilai tambah tersebut, sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.

Industri rumah tangga, industri kecil dan menengah masih mendominasi sektor industri ekonomi Sulawesi Tengah. Potensi sumber daya alam lainnya, berupa minyak dan gas bumi, bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum sepenuhnya memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah.

3. Belum Memadainya Pembangunan Infrastruktur.



Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Sulawesi Tengah belum memadai, sebagai akibat dari keadaan geografisnya yang sangat luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdataman dan terpencil. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah, seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Kondisi jalan provinsi hampir setengahnya masih termasuk kategori tidak mantap. Secara fungsional kondisi jalan di Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2010 adalah : jalan nasional sepanjang 2.181,95 Km dengan kondisi mantap sepanjang 1.723,64 Km atau sekitar 78,99 %, tidak mantap sepanjang 458,34 Km atau sekitar 21,01 %. Disamping itu jalan provinsi sepanjang 1.648,75 Km dengan kondisi mantap sepanjang 800,45 Km atau sekitar 59,34 % dan tidak mantap sepanjang 548,50 Km atau sekitar 40,66 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa belum memadainya pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah sebagai akibat dari rendahnya fiskal daerah dalam mendanai program kegiatan infrastruktur.

Disamping itu, semakin meningkatnya arus pergerakan manusia, barang dan jasa dari dan ke Sulawesi Tengah melalui Bandara Udara Mutiara Palu, maka perlu adanya peningkatan infrastruktur bandara baik sarana dan prasarana sisi darat maupun udara serta keselamatan. Pada saat ini bandara Mutiara Palu memiliki landasan pacu sepanjang 2.250 m yang hanya bisa didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 – 900. Disamping itu Bandar udara lainnya seperti Bandar Udara Amirudin Amir Luwuk, Bandara Kasiguncu Poso, Bandara Lalos Tolitoli, Lapangan Terbang Pogogul Buol, perlu peningkatan dalam memacu akselerasi pembangunan di daerah Kabupaten.

Energy listrik yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat dan industry, merupakan permasalahan yang cukup serius, sehingga menghambat pertumbuhan industri unggulan di Sulawesi Tengah. Rasio kelistrikan yang dicapai Propinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini sebesar 42,70% sedangkan rasio kelistrikan nasional mencapai 64 %. Untuk mencapai target rasio kelistrikan



nasional sebesar 64 %, Sulawesi Tengah masih banyak membutuhkan tambahan daya, karena Daya Mampu pada saat ini sebesar 98.182 KW. Dengan demikian Sulawesi Tengah masih membutuhkan penambahana daya sebesar 48.976 KW, ditambah dengan daftar tunggu saat ini sebesar 22.234 KW sehingga total kebutuhan saat ini menjadi 172.000 KW.

4. Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum Dan Ham Belum Optimal

Pada saat ini kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupun fungsi kelembagaan belum efektif dan efesien, sehingga upaya tewujudnya pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan, untuk itu diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Disamping itu, belum optimalnya kualitas pelayanan publik, rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, rendahnya pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari filosofi *good governance*, akan mengakibatkanbelum profesionalnya penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan, sehingga belum memiliki indicator dan pola yang jelas.

Budaya hukum masyarakat, masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum yang masih rendah dan belum merata.Selain itu kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan hukum serta penyerasian tugas – tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan Belum Optimal.

Pada saat ini, pemanfaatan sumberdaya alam belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin menipis. Disamping itu,



maraknya eksploitasi sumberdaya alam, yang ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak, akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak, selain itu meningkatnya konservasi hutan alam dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan, mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya alam.

Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan, merupakan permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi hasil hutan dan energi untuk pembangunan, dan masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibandingkan dengan potensinya.

4.2.4 Isu Strategis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis yang mengacu pada isu-isu strategis Sulawesi Tengah dalam meningkatkan daya saing, baik di lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat memengaruhi upaya terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam lima tahun mendatang (2011 – 2016).

4.2.4.1. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman/ tantangan yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

1. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:
 - a. Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dapat leluasa melakukan mobilitas



- penduduk dan barang dari dan ke BanggaiKepulauan,
- b. Terbukanya pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi unggulan lokal yang dihasilkan Kabupaten Banggai Kepulauan seperti hasil perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, serta kehutanan
 - c. Terbukanya jaringan dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - e. Semakin terbukanya jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun wisata budaya Kabupaten Banggai Kepulauan

Di lain pihak, globalisasi juga dapat membawa dampak yang merupakan tantangan/ancaman yang harus dihadapi oleh Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:

- a. Investasi yang terbuka luas akan mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk laut, pesisir dan sumber daya alam lainnya seperti hutan secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan lingkungan
- b. Arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan petani/nelayan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Ketahanan pangan, kenaikan harga BBM dan dicabutnya subsidi pupuk akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan



menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- d. Dinamisasi perpindahan penduduk, globalisasi informasi dan perkembangan IPTEKS terutama IT akan berdampak pada pergeseran nilai dan budaya lokal
2. Demokratisasi ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:
- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat
 - b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan jender, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat
 - c. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat

Di lain pihak, demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi kelangsungan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:

- a. Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat;



- c. Peran partai dan elit politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.
3. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, meliputi :
- a. Dengan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat
 - d. Pemekaran wilayah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan

Disamping itu desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
- c. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan



lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah

- d. Akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah akan mengakibatkan meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten BanggaiKepulauan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah

4.2.4.2. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal

Identifikasi dan analisis lingkungan internal Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia yang dapat mendorong pembangunan dan merupakan daya saing kabupaten Banggai Kepulauan, seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana. Disamping itu juga mengidentifikasi berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam lima tahun mendatang. Identifikasi dan analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia
 - a. Sebagai kekuatan sumber daya alam di Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah
 - Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya sumber daya kelautan, perikanan, dan pertanian yang belum optimal pengelolaannya
 - Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat potensial bagi perolehan devisa, khususnya dari komoditi perikanan, rumput laut dan hasil olahan perikanan.
 - Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah dan pariwisata
 - Banggai kepulauan sebagai taman nasional laut dan kawasan andalan berdasarkan peraturan pemerintah pusat.
 - Tingginya etos kerja dan nilai-nilai religius masyarakat Banggai Kepulauan



- b. Kelemahan pada sumber daya alam yang dapat diidentifikasi dan sekaligus menjadi isu strategis untuk dikembangkan adalah:
 - Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan hasil laut
 - Lahan pertanian dan perkebunan sebagian besar belum dikelola secara optimal
 - Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat masih relatif rendah.

2. Tatanan pemerintahan
 - a. Sebagai kekuatan tatanan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah
 - Sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam memajukan banggai kepulauan
 - Budaya membangun daerah dengan motto konggolio kotano kinendeke kolipu (membangun daerah perkuat tanah leluhur)
 - b. Kelemahan yang teridentifikasi pada tatanan pemerintahan otonomi adalah:
 - Kelembagaan pemerintahan belum tertata secara memadai
 - Mutu dan jumlah sumber daya aparatur yang masih rendah.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan
 - Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik
 - Meningkatnya peluang terjadinya konflik baik antar elit maupun antar masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - Belum optimalnya pelayanan pemerintahan
 - Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD)
 - Kurang meratanya pelayanan publik

3. Prasarana perekonomian daerah
 - a. Prasarana perekonomian di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diidentifikasi kekuatannya adalah:
 - Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki pelabuhan yang melayani angkutan lokal, regional dan nasional, sehingga dapat memperkuat



keterkaitan baik antar wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, maupun keterkaitan antara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kabupaten/kota lainnya.

- Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki akses perhubungan laut yang terbuka untuk menuju ke daerah propinsi lain di kawasan Indonesia Timur.

b. Kelemahan yang dapat diidentifikasi dari prasarana perekonomian di Kabupaten Banggai kepulauan adalah:

- terbatasnya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, telekomunikasi dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha.
- Masih terbatasnya infrastruktur dasar antara lain sarana dan prasarana perhubungan laut dan darat
- Belum berkembangnya kelembagaan BUMD dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)dalam pengembangan ekonomi daerah
- Terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat yang masih bersifat subsisten, berskala kecil dan tidak berorientasi pasar
- Kurangnya pemupukan modal
- Masih rendahnya minat dunia usaha dalam mengelola potensi sumber daya alam terutama perikanan dan pertanian
- Belum optimalnya investasi swasta

4. Pemenuhan Hak dasar Masyarakat

a. Pemenuhan hak dasar masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diidentifikasi kekuatannya adalah:

- Terdapat sarana pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas yang tersebar di seluruh wilayah.
- Terdapat sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar di wilayah Kabupaten



- Adanya kepedulian pemerintah Kabupaten banggai Kepulauan yang sangat besar terhadap Pendidikan sebagai usaha peningkatan kualitas manusia
 - penyelenggaraan pendidikan yang mudah dan terjangkau
- b. Kelemahan yang dapat diidentifikasi dari pemenuhan hak dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:
- Belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan
 - Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik
 - Masih rendahnya mutu pendidikan
 - Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat
 - Terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di daerah pedesaan
 - Belum meratanya fasilitas perumahan (listrik, air bersih dan sanitasi) terutama di pulau-pulau kecil dan terpencil
 - Belum optimal dan meratanya fasilitas wilayah/infrastruktur